

Meneladani Nilai Kepahlawanan Pejuang

BANTUL (KR) -Momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan Forum Masyarakat Mandiri Kecamatan Dlingo Bantul, menggelar jalan sehat dan senam massal, Minggu (15/11). Acara yang dipusatkan di Sendang Mangunan Dlingo Bantul, yang diikuti masyarakat dari Desa Mangunan dan sekitarnya juga dihadiri Hj Sri Surya Widati dan anggota Komisi II DPR RI Drs HM Idham Samawi. Selain berorientasi untuk meningkatkan kualitas aspek kesehatan sebagai sasaran utamanya, panitia juga men-

angkat potensi kesenian lokal Dlingo dengan menggelar pentas terbuka.

Ketua Forum Masyarakat Mandiri Dlingo Kecamatan Dlingo Bantul, Legi di sela acara mengatakan, program senam massal dan jalan sehat tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

"Kami panitia berusaha meningkatkan kualitas kesehatan lewat program sederhana ini, tetapi kami yakin itu berhasil," ujarnya.

Legi mengungkapkan, kesehatan masyarakat menja-

di penting ketika manusia hidup bermasyarakat. Karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan disuatu daerah. Baik pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM manusia secara umum.

Selain itu nilai-nilai Hari Pahlawan yang meneladani semangat perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan, harus dikelempakan. Namun konteks perjuangan tersebut tidak sama dengan ketika merebut kemerdekaan.

"Kami dorong generasi

muda meneladani semangat para pahlawan, itu sangat penting sebagai motivasi dalam mengisi kemerdekaan," ujar Legi.

Selain faktor kesehatan di fokus tujuannya, panitia juga berusaha dari even itu menjadi momentum membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Karena kebersamaan harus dijaga di tengah masyarakat, supaya terjadi keharmonisan. Oleh karena itu dalam kondisi serba modern seperti sekarang ini, budaya gotong royong harus tetap dijaga.

(Roy)-a



KR/Suno Piyasa

Hj Sri Surya Widati disambut masyarakat Mangunan Dlingo Bantul.

Kedaulatan Rakyat, 18 November 2015

RABU LEGI, 18 NOVEMBER 2015
(5 SAPAR 1949)

BANTUL

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 4

CIPTAKAN PEMERINTAHAN BERSIH Jogoboyo Siap Menangkan Pasangan Ida-Munir

BANTUL (KR) - Paguyuban pengaman Supporter Bersih Bantul (Passer-boni) yang terbentuk dalam wadah Jogoboyo, deklarasikan mendukung Cabup/Cawabup Hj Sri Suryo Widat/Misbakhul Munir (Ida-Munir). Deklarasi dihadiri pasangan Sri Suryo Widat dan Misbakhul Munir, digelar di Pyramid Jalan Persegiempat Senin (16/11) malam. Dalam kesempatan itu juga dibacakan ikrar, Jogoboyo siap memenangkan pasangan nomor urut dua ini dalam pemilihan Pilkada 2018.

Komandan Jogoboyo Prasetyo Wibowo didampingi Sekretaris Jogoboyo Lukas Ekka Purwanto mengatakan, deklarasi tersebut tidak sekadar seremonial. Namun tetap selanjutnya langsung bergerak di tengah masyarakat, untuk meraih dukungan agar Cabup/Cawabup Ida-Munir menang dalam Pilkada. "Kami siap memenangkan Bu Idham dan Pak Munir dalam Pilkada nanti," tegas Prasetyo.

Lukas menambahkan, anggota Jogoboyo tersebar di 17 kecamatan di Bantul. Dari jumlah tersebut, mereka akan mengadakan massa dimasing-masing wilayah. "Kami tetap satu komando, namun area kami tersebar di Bantul dengan asarasan semua lapisan masyarakat, untuk memenangkan Bu Idham," ujar Lukas.

Pihaknya tidak mau dikalahkan oleh rasyidnya sekadar seremonial dan tidak ada kelanjutan. Namun sebagai mesin politik memang sudah siap memenangkan Ida-Munir. "Kami hadir dari sebuah kebersamaan, dan itu kami yakin sebagai modal utama untuk memenangkan pasangan Ida-Munir," tambah Lukas.

Sementara Cawabup Misbakhul Munir mengatakan, pihaknya sejak awal sudah punya komitmen dalam Pilkada tidak menggunakan cara kotor dan menjelakan calon lain. Karena hal tersebut memang tidak sepatutnya dilakukan. Dukungan dari Jogoboyo sudah bisa dipastikan mampu menang karena telah melawan, dan unsur partai untuk memenangkan Ida-Munir.

"Kami sudah punya komitmen untuk tidak menggunakan politik uang, itu sebagai upaya menciptakan pemerintahan bersih," ujar Munir.

Oleh sebab itu Misbakhul Munir meminta agar Jogoboyo sebagai massa pendukung harus menggunakan cara-cara yang elegan, tanpa menjelakan calon lain.

(Roy)-b



Kes-Ban/Republika

Asangan Cabup/Cawabup Ida-Munir menerima pakta integritas dukungan dari perwakilan Jogoboyo untuk memenangkan Pilkada Desember mendatang.

RENTAN DIMOBILISASI Pendamping Difabel Disarankan dari Keluarga

BANTUL (KR) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul menyarankan, pendamping bagi pemilih penyandang disabilitas (difabel) merupakan pihak keluarga. Karena pilihan seseorang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bersifat rahasia, dan tidak boleh diketahui banyak orang. Panwaslu mengkhawatirkan, jika pendamping pemilih difabel bukan dari pihak keluarga akan rentan dimobilisasi dan pilihannya diarahkan ke salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.

Ketua Panwaslu Bantul Supardi kepada KR di kantornya, Selasa (17/11) menuturkan, konsentrasi Panwaslu sekarang ada pada pengawasan penyetingan TPS, terutama mengakomodir TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas.

"Misalnya, jika di salah satu TPS terdapat ada pemilih tuna netra, apakah TPS tersebut sudah disiapkan templet. Yaitu surat suara huruf braille, bagi TPS yang terdata ada pemilih tu-

na daksa yang menggunakan kursi roda apakah di TPS tersebut disediakan akses untuk membantu kursi roda dapat masuk ke TPS dan sebagainya," ujar Supardi.

Ditegaskan Supardi, baik penyelenggara pemilu serta pengawas pemilu ditingkat TPS tidak diperbolehkan membantu mencobloskan surat suara. Mereka hanya diperbolehkan memfasilitasi dengan mempermudah akses bagi difabel, untuk melakukan pencoblosan.

"Karena hak pilih sesuai aspirasi masyarakat masing-masing, disarankan kalau memang penyandang difabel tersebut harus dibantu maka hendaknya dari keluarga masing-masing. Hal ini agar tidak terjadi pengarah-pengarahan, bahkan mobilisasi untuk memilih paslon tertentu," urainya.

Adapun pilihan seseorang, menurut Supardi tidak boleh diketahui bahkan dibocorkan pada orang lain. Selain itu, Panwaslu saat ini juga tengah melakukan pembekalan pada pengawas di TPS.

Dalam pembekalan tersebut, Panwaslu menegaskan pengawas TPS untuk menjunjung tinggi netralitas.

"Di jajaran pengawas pemilu Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah jelas. Kalau dari hasil *screening* dan wawancara terlihat tidak netral. Maka langsung dinyatakan tidak layak dan gugur sebagai pengawas TPS," lanjutnya.

Adapun jumlah pengawas TPS sebanyak 1.768 orang dinyatakan sudah memenuhi kuota. Dan terkait netralitas, tidak hanya menjadi kewajiban pengawas pemilu saja, namun juga penyelenggara pemilu.

Hal ini karena penyelenggara pemilu tingkat bawah merupakan ujung tombak kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi Pilpup 9 Desember mendatang. Sedangkan terkait potensi konflik yang harus diwaspadai, di antaranya dukungan yang berlebihan pada masing-masing paslon ditingkat akar rumput dan sebagainya.

(Aje)-e

JUMAT PON, 20 NOVEMBER 2015
(7 SAPAR 1949)

BANTUL

HARSONO PERMUDAH LAYANAN KESEHATAN

Ida Mudahkan Izin Usaha

BANTUL (KR) - Debat calon bupati (Cabup) Bantul, Kamis (19/11) di Jogja TV berlangsung lancar. Debat cabup yang mengusung tema "Layanan Dasar, Peningkatan Ekonomi Kecil dan Menengah serta Tata Ruang" ini membahas program dan rencana cabup kedepan jika salah satu di antara mereka berhasil menjabat menjadi Bupati Bantul. Debat dipandu moderator Dr Mada Sukmajati dari Pispol UGM.

Cabup nomor urut 1, H Suharsono mengukir misi pertamanya nanti akan mempermudah layanan kesehatan. Sementara cabup nomor urut 2, Hj Sri Surya Widati berkomitmen mempermudah izin usaha dan mempertahankan momentum lima kawasan aglomerasi perkotaan, dengan tidak mengabaikan izin membangun perumahan sebagai bagian dari usaha melindungi lahan hijau sebagai usaha menjaga ketahanan dan swasembada pangan di Bantul.

Dalam penyampaian visi dan misi, Hj Sri Surya Widati memantarkan, pe-

ntan tidak dikembalikan izin prinsip membangun perumahan. Bantul sudah memiliki tata ruang, dan hotel-batal dijaga karena konservasi hukumnya pidana sehingga harus berhati-hati," tegas Ida.

Untuk penanganan bencana, Ida menambahkan, disampaikan kepada masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa dan menyiapkan materi antisipasi bencana pada pelajaran sekolah.

Sementara Cabup Suharsono menyampaikan problematika konversi lahan pertanian di Bantul, merupakan hal yang meresahkan. Maka harus ada penataan kawasan yang benar, seperti penataan kawasan industri, perumahan, lahan hijau dan sebagainya. "Akar hijau kebanyakan dirang semu menjadi lahan pertanian. Ini pasti diraguh. Sementara untuk penanganan bencana kami akan memanfaatkan ORARI dan RAPI," jelas Suharsono.

Terkait kesehatan, Suharsono berkomitmen, memberikan akses kesehatan seluas-luasnya pada masyarakat menikmati layanan kesehatan. Untuk penunjang Puskesmas dan ambulans, tidak perlu bertele-tele mengonakannya. Suharsono juga berencana akan memerangi penyakit air di sekolah dan sebagainya.

Sementara Sri Surya Widati menyampaikan, pelayanan kesehatan di Bantul ada 27 Puskesmas, dengan 17 pelayanan rawat inap. Adapun pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan harga mati. Bantul juga punya program unggulan, yaitu Dusun Bebas empat masalah kesehatan, yang meliputi mengurangi kemiskinan ibu melahirkan, bayi, gizi buruk dan demam berdarah. Bantul juga sudah menyelenggarakan guru-guru ke S2, sebagai upaya memajukan generasi muda.

"Kami juga mencari dan meng-swaping rumah ke rumah, untuk

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 4



DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2015

Debat Pilbup yang ditayangkan langsung Jogja TV, Kamis (19/11).

Paola Kempalanti ini Suharsono mengukir akan memaksimalkan pengembangan potensi UMKM di Bantul, dengan strategi pemetaan dan pengorganisasian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Di akhir acara Suharsono berpesan, supaya masyarakat mengubah paradigma yang tadinya dilayani, sekarang harus melayani. Sementara Ida berpesan untuk menitik-otakkan lapangan Pilbup dengan menjaga keamanan, kedamaian dan keberlanjutan. (Aja/Roy) s

Ribuan Simpatisan Ida-Munir Padati Lapangan Trirenggo

BANTUL (KR) - Ribuan massa pendukung Cabup-Cawabup pasangan Hj Sri Surya Widati-Misbakhul Munir (Ida-Munir), menghadiri kampanye terbuka di Lapangan Trirenggo Bantul, Minggu (22/11). Dalam kampanye tersebut juga dihadiri partai koalisi pendukung pasangan cabup-cawabup nomor urut dua itu, yakni PDIP, NasDem, PPP, Golkar, Perindo serta Demokrat. Dalam kampanye tersebut pasangan Ida Munir menghadirkan juru kampanye Drs HM Idham Samawi.

Namun pesta demokrasi yang awalnya berjalan lancar sempat terganggu, setelah terjadi kesalahpahaman antara simpatisan pendukung Ida-Munir. Dari kejadian itu dua anggota polisi mengalami luka ringan, sementara Ketua DPC PPP Bantul Bariq Gufron luka dikepala dan seorang Satgas mengalami luka ditangan.

Ketua Pemenangan Cabup-Cawabup Ida-Munir, Aryunadi mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan sisa waktu untuk menggalang massa di Bantul. "Ka-

mi akan kerja keras meyakinkan masyarakat Bantul, jika pasangan Ida-Munir hadir untuk memberikan kesejahteraan warga Bantul," ujar Aryunadi.

Sedangkan Edy Susilo yang mewakili Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadholi mengatakan, jika pihaknya sudah sepakat untuk mendukung pasangan Ida-Munir. Sehingga waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin agar efektif menggalang massa. Dalam kampanye itu ribuan simpatisan dari Bantul memadati lapangan.

Terkait dengan insiden di Lapangan Trirenggo, Edy yakin hal tersebut tidak akan mempengaruhi koalisi. Karena kejadiannya begitu cepat dan dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Edy mengungkapkan, jika kejadian tersebut diyakini dilakukan oleh oknum yang tidak menginginkan kedamaian. "Dari semua partai kami yakin tidak menginginkan kejadian ini terjadi," jelas Edy bersama Ketua Golkar Bantul, Agus Subagyo, Eko Sutrisno Aji, Ketua DPC PDIP Bantul Aryunadi di RSUD Bantul.

Ditambahkan, dalam kejadian tersebut hanya kesalahpahaman yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, semuanya sudah diserahkan kepada pihak berwajib. Dalam peristiwa itu sebuah motor rusak setelah dibakar oknum tidak bertanggungjawab. (Roy)-a



Drs HM Idham Samawi (tengah), Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir dalam kampanye di Lapangan Trirenggo Bantul.

KR-Sukro Riyadi

IDA-MUNIR KOMITMEN JAGA PASAR TRADISIONAL Selalu Berpihak kepada Rakyat

BANTUL (KR) - Cabup-Cawabup Hj Sri Surya Widati-Misbakhul Munir (Ida-Munir), Selasa (24/11) kemarin memanfaatkan jadwal kampanye dengan menyanjangi pedagang di dua pasar berbeda. Pasar pertama yang dikunjungi ialah Pasar Turi Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro, dan Pasar Sorobayan Sanden Bantul. Dalam kunjungannya ke pusat tumbuhnya ekonomi rakyat kecil itu, Ida-Munir disambut antusias ribuan pengunjung dan pedagang pasar. Mayoritas pedagang dan pengunjung menilai, Hj Sri Surya Widati sebagai so-

sok pemimpin yang selalu memperhatikan rakyat kecil. Ny Rubinah, yang ditemui di Pasar Turi Sidomulyo mengungkapkan, Sri Surya Widati selalu memperhatikan masyarakat kecil. "Bu Idham, *kerso ndugeni* pedagang pasar jadi cermin pemimpin yang berpihak pada semua rakyatnya," ujarnya. Menurut Rubinah pemimpin dengan karakter seperti itu harus dipilih. Karena sebagai rakyat kecil sudah merasakan program pembangunan pasar-pasar di Bantul sebelumnya. Sedangkan Ny Dasyam (65), warga Wonoreto Desa Gading Sari San-

den, yang ditemui di Pasar Sorobayan mengatakan, pihaknya merasa tentrem dipimpin Sri Surya Widati. Pedagang sayuran itu menilai, dalam memimpin Sri Surya Widati selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya. "Bu Idham itu bijaksana, untuk urusan rakyatnya mudah tidak berbelit. Termasuk adil dan baktinya mengunjungi pasar tidak hanya ketika akan jadi Bupati. Sebelumnya juga sudah. Sok Sri Surya Widati selalu bersikap *ngoyomi* dan menghargai rakyat kecil, jelas perempuan yang sudah 20 tahun jadi pedagang itu.

Sementara Ny Agus warga Cimpon Tirtosari Kecamatan Kretek mengungkapkan, sebagai perempuan merasa diperhatikan untuk beragam urusan, baik dari kesehatan hingga pendidikan. Bahkan ketika datang ke pasar tradisional, masyarakat kecil merasa *dijawonghe*. Sementara Ketua Tim Pemantauan Ida-Munir Kecamatan Bambanglipuro Bantul, Edy Murjito SPd mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada pasangan Ida-Munir jika diberi amanah rakyat Bantul pasar segera dilakukan renovasi.



Hj Sri Surya Widati saat mengunjungi pedagang di Pasar Turi Sidomulyo.

Pada kesempatan tersebut Hj Sri Surya Widati mengatakan, keberadaan pasar tradisional harus selalu diperhatikan. Karena lokasi tersebut menjadi pusat masyarakat kecil dalam menggerakkan sektor perekonomian. (Roy)-b

EVALUASI PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

Pertanyaan Mengarah ke Pribadi Wajib Disetop

BANTUL (KR) - Jajaran penyelenggara dan pengawas Pemilu baru saja melaksanakan evaluasi debat publik pertama, yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam evaluasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta penyelenggara debat untuk melakukan evaluasi materi. Jika ada pertanyaan yang mengarah ke pribadi dan melenceng dari aturan, Panwaslu mendesak secara tegas untuk menyetop.

"Secara teknis penyelenggaraan tidak ada masalah. Hanya saja kami dari Panwaslu merekomendasikan, untuk beberapa materi masih perlu dievaluasi. Ambil contoh misalnya, kalau ada pertanyaan yang mengarah ke pribadi dan sebagainya, bahkan melenceng dari materi yang disepakati, sesuai aturan tidak diperkenankan. Jadi kami usulkan, peran moderator lebih pro aktif lagi untuk mengantisipasi," tegas Ketua Panwaslu Bantul Supardi, ketika ditemui KR di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Supardi menegaskan, jika ada pertanyaan salah satu

calon yang mengarah ke pribadi bahkan upaya *black campaign* harus benar-benar disetop. Dalam debat publik, moderator memiliki kewenangan penuh untuk menyaring pertanyaan yang dilontarkan.

Panwaslu juga mengusulkan, sebelum pelaksanaan debat publik secara langsung moderator perlu diberitahu oleh KPU, untuk benar-benar menyaring pertanyaan yang dilontarkan. Supardi mencatat, pada debat publik yang disiarkan secara langsung beberapa waktu lalu ada dua pertanyaan yang melenceng ke arah pribadi.

Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara SIP menambahkan, KPU bersama instansi terkait melakukan evaluasi pelaksanaan debat publik putaran pertama. Selain evaluasi, KPU juga mempersiapkan pelaksanaan debat publik putaran 2 yang akan diikuti oleh cawabup masing-masing paslon, Abdul Halim Muslih (nomor urut 1) dan Drs Misbakhul Munir MSi (nomor urut 2).

Johan menambahkan, beberapa hal yang disampaikan dalam evaluasi di antaranya, banyak yang menilai secara umum pelaksanaan debat publik putaran pertama sudah cukup baik. Untuk pola pengamanan debat publik, imbuhan Johan tetap dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. "Semua pihak wajib menaati tata tertib yang sudah disepakati bersama. Moderator didampingi KPU dan Panwaslu akan melakukan *briefing*

kepada calon sebelum dimulainya debat publik," lanjut Johan.

Ditambahkan Johan, debat publik pelaksanaan debat publik putaran pertama. Selain evaluasi, KPU juga mempersiapkan pelaksanaan debat publik putaran 2 yang akan diikuti oleh cawabup masing-masing paslon, Abdul Halim Muslih (nomor urut 1) dan Drs Misbakhul Munir MSi (nomor urut 2).

Sama dengan debat sebelumnya, akan ada 7 segmen. Diawali segmen 1, pemaparan visi misi, segmen 2 pendalaman visi misi, segmen 3, 4 dan 5 penajaman visi misi dikaitkan dengan beberapa isu tata kelola pemerintahan, seperti reformasi birokrasi, penerapan hukum, akuntabilitas sosial dan sebagainya. Selanjutnya segmen 6 yang berisi tanya jawab dan tanggapan, calon diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan tanggapan kepada calon lainnya. Segmen 7 adalah pemberian *closing* statemen. (Aje)-b

Pedagang Minta Dibuatkan Tempat Jualan Kayu

BANTUL (KR) - Sejumlah pedagang menyampaikan aspirasinya langsung kepada Cabup Hj Sri Surya Widati ketika mendatangi Pasar Pundong dan Mangiran Srandakan Bantul, Kamis (26/11).

Kedatangan Hj Sri Surya Widati untuk menyambangi pedagang dan pengunjung pasar itu benar-benar dimanfaatkan warga, untuk menyampaikan keinginannya. Mereka percaya Hj Sri Surya Widati merupakan sosok pemimpin yang sudah terbukti memperhatikan rakyat kecil, tidak terkecuali pedagang pasar.

Ny Sarjilah, salah satu pedagang kayu di Pasar Pundong Bantul tidak membuang kesempatan begitu Hj Sri Surya Widati tiba di Pasar Pundong. Setelah menerima alat peraga kampanye yang

diberikan langsung oleh Sri Surya Widati. Warga Ketandan Patalan Jetis Bantul tersebut langsung menyapa Cabup nomor urut 2 tersebut. Dalam pembicaraan itu, perempuan itu langsung meminta agar Sri Surya Widati membangun tempat khusus bagi penjual kayu di Pasar Pundong. Permintaan tersebut dilakukan, karena selama ini dagangan kayu berada ditepi jalan.

Ny Sarjilah mengatakan, permintaan lokasi khusus dagangan kayu karena kondisinya tidak memadai. Perempuan tersebut berharap, ketika ada renovasi pasar khusus penjual kayu harus dibuatkan. "Wau kulo matur Bu Idham, nyuwun supados didamelke lokasi kagem sadayan kajeng, kulo pitados, Ibu niki piyantune



KR-Sukro Riyadi

Hj Sri Surya Widati ketika berada di Pasar Mangiran Srandakan Bantul.

sae menawi kaliyan rakyati-pun," ujar Suparjilah.

Mendapat permohonan pedagang kayu itu, Hj Sri Surya Widati akan memperjuangkan keinginan rakyatnya tersebut. Kesediannya itu karena kepentingan rakyat kecil diatas segala-galanya.

Dalam kampanye itu Sri Surya Widati menyapa satu per satu pengunjung, dan pedagang pasar. Hal serupa juga dilakukan di Pasar Mangiran Srandakan Bantul, dan Sri Surya Widati kembali menyambangi satu persatu pengunjung dan pedagang pasar. (Roy)-a

HALIM INGIN WUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Munir Berkomitmen Mudahkan Pelayanan Publik

BANTUL (KR) - Debat pasangan calon (paslon) wakil bupati yang berlangsung Kamis (26/11) malam dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan", diikuti dua paslon wakil bupati, yakni Abdul Halim Muslih (nomor urut 1) dan Drs Misbakhul Munir MSi (nomor urut 2). Pada debat publik tersebut, Munir berkomitmen untuk memudahkan pelayanan publik, dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa. Sementara Halim berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menyampaikan visi dan misi-misi Munir menuturkan, akan melakukan penguatan tata kelola pemerintahan desa dengan meningkatkan kapasitas desa. Keluarnya UU Nomor 6 tentang Desa membuat anggaran desa menjadi tercukupi. Untuk pelaksanaan dan kontrolnya, akan diefektifkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM desa, hal ini lantaran dalam UU diatur jika desa

diberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengelola dana.

Sementara Halim menyatakan UU Nomor 6 merupakan peluang dan harapan baru yang memungkinkan desa tumbuh dan berkembang cepat. Dengan UU tersebut, desa punya banyak kewenangan dan mendorong upaya desa berkembang dan mandiri. "Pemda harus dapat memberikan fasilitasi dan supervisi. Selain itu harus ada sinkronisasi antara pemda dan desa supaya

program tidak tumpang tindih," ujar Halim.

Dengan moderator Abdul Gaffar Karim dari Fisipol UGM, debat publik yang berlangsung di Jogja TV terbagi atas beberapa segmen yakni paparan visi-misi, pendalaman visi-misi, program serta tanya jawab terkait isu aktual. Dalam penyampaian visi misi Munir menjelaskan, dengan 930.000 jiwa lebih penduduk Bantul harus bisa mewujudkan Bantul yang aman, sejahtera, demokratis, agamis. Selain itu juga pemerintah yang berempati, jujur dan bertanggung jawab, pemanfaatan sumber daya lokal, pengurangan risiko bencana dan berkepribadian Pancasila.

Sedangkan Halim menyampaikan visi dan misi mewujudkan masyarakat sejahtera berlandaskan nasionalisme, peningkatan kualitas birokrasi, pem-

berantasan korupsi, nepotisme dan menerapkan akuntabilitas. Terkait penanganan korupsi, Halim menegaskan akan mtenjunjung tinggi transparansi publik dan kebebasan berpendapat warga yang mengusulkan gagasan.

Lebih lanjut Munir menambahkan, untuk mencegah kasus korupsi, selain melakukan transparansi publik, pihaknya akan selalu melibatkan warga dalam partisipasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebuah kebijakan. "Proses perencanaan pembangunan diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). APBDes dan APBD dapat diakses dengan mudah menjadi salah satu indikator keterbukaan publik," tegas Munir.

Dalam debat Munir juga menyinggung mengenai peningkatan moralitas dan kapasitas pelayanan, mulai dari desa hingga kabupaten. (Aje)-d

Tampung Aspirasi Pedagang Pasar



KR-Sukro Riyadi

Hj Sri Surya Widati menyalami pedagang di Pasar Imogiri Bantul.

BANTUL (KR) - Cabup Hj Sri Surya Widati, Senin (30/11), kembali mengunjungi pasar tradisional yang merupakan tulang punggung penggerak perekonomian masyarakat kelas bawah.

Dalam kesempatan itu juga dimanfaatkan cabup nomor urut dua ini untuk menjangkau aspirasi dari pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Selain itu Sri Surya Widati

juga menghadiri pertemuan Majelis Dhuha Bantul di Omah Kampung Jalan Bantul.

Ny Supiah warga Selopamioro Imogiri Bantul mengungkapkan, Sri Surya Widati sudah mau berkunjung ke pasar mencerminkan calon pemimpin pro rakyat kecil.

"Siapa saja calon pemimpin yang mau berkunjung ke pasar untuk mendengar

suara rakyat kecil itu mencerminkan pemimpin yang peduli rakyat, dan Bu Idham selama ini sudah membuktikan," ujarnya.

Perempuan tersebut berharap kepemimpinan Hj Sri Surya Widati yang selalu peduli dengan rakyat dilanjutkan. Menurutnya, calon pemimpin memang harus turun langsung ke pedagang untuk mendengarkan permasalahan di lapangan. Sehingga ketika memimpin kelak, selalu memperhatikan rakyatnya.

Sementara Hj Sri Surya Widati mengungkapkan, kunjungannya ke pasar-pasar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengembangan pasar di Bantul. Kehendak pedagang atau pengunjung pasar itu akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan Bantul ke depan. **(Roy)-a**

Ida-Munir Peduli Pedagang Pasar Tradisional

BANTUL (KR) -Kehadiran Cabup Hj Sri Surya Widati di Pasar Semampir dan Sungapan Sedayu Bantul disambut antusias pedagang dan pembeli, Rabu (2/12). Demikian pula Cawabup Misbakhul Munir di Pasar Dlingo dan Pleret, juga mendapat sambutan. Pedagang berharap agar pasangan Ida-Munir meneruskan program-program yang berpihak kepada rakyat. Bagi masyarakat suatu pemerintahan harus hadir ditengah masyarakat, tentunya lewat program-program pro rakyat.

Ny Etik salah satu pedagang di Pasar Sungapan Sedayu Bantul mengungkapkan, selama ini Hj Sri Surya Widati sudah membuktikan komitmennya memperhatikan rakyat kecil. Dengan kondisi seperti itu, mestinya yang sudah baik tetap dilanjutkan. "Rakyat seperti kami ini membutuh-

kan kepastian, Bu Idham sudah hadir dalam kehidupan kami, lewat program pembangunan pasar tradisional," ujar warga Pajangan itu.

Keberadaan pasar tradisional memang wajib ditingkatkan kualitasnya. Hal tersebut penting sebagai strategi menghadapi persaingan dengan pusat perbelanjaan modern di Bantul. "Jangan sampai kita ini kalah dengan mini market, oleh karena itu pasar di pelosok sekalipun harus terus dibenahi," tambahnya.

Hj Sri Surya Widati mengatakan, keberadaan pasar tradisional sebagai pusat tumbuhnya sektor ekonomi per-ekonomian harus dijaga eksistensinya. Komitmen tersebut sangat penting, ketika orientasinya untuk melindungi masyarakat pelaku usaha kecil. Sementara Misbakhul Munir meng-



K3T-Sukoto Riyadi

Hj Sri Surya Widati mengunjungi Pasar Sungapan Sedayu Bantul.

ungkapkan, kehadirannya ke pasar tradisional untuk melakukan sosialisasi dengan para pedagang, baik di Pasar Dlingo dan Pleret. (Roy)-a

HARSONO-HALIM 'BLUSUKAN' DATA GAKIN

Ida-Munir Harmonisasi Program dan Inventarisir Masalah

BANTUL (KR) - Debat pasangan calon (Paslon) Bupati Bantul putaran terakhir, Kamis (3/12) malam berlangsung lancar. Debat publik dengan moderator Wasingatu Zakiyah itu mengambil beberapa topik, di antaranya penajaman visi dan misi, wujud konkret usaha penyelesaian rakyat serta program 100 hari ke depan jika mereka terpilih menjadi kepala daerah.

Paslon nomor urut 1, Subarsono-Abdul Halim Muslih berkomitmen *blusukan* untuk melakukan pendataan warga miskin yang lebih akurat, sementara paslon nomor urut 2, Hj Sri Surya Widati-Ida Musihkhal Munir MSI berencana mengharmonisasikan program yang akan dijalankan serta menginventarisir permasalahan dalam masyarakat berikut mencari solusi upaya penyelesaian.

"Program 100 hari pertama, saya akan melakukan *blusukan* ke desa-desa untuk melacak kembali pendataan warga miskin (gakin) yang

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggapai Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja keras, melayani warga secara maksimal, tidak korupsi dan berbuat tidak tak terpuji," jelasnya.

Sedangkan Cavabup nomor urut 2, Misbahul Munir menambahkan, pihaknya berencana elatursahmi ke tokoh masyarakat, agama dan pimpinan SKPD pada 100 hari kepemimpinannya untuk mendenyahkan aspirasi mereka sambil menjalankan program pada anggaran yang sudah ditetok. "Berkaitan dengan data gakin, ada beberapa data yang Pemkab tidak dapat merubah secepatnya, karena data tersebut merupakan data dari Balmi Pusat Statistik (BPS)," jelasnya.

Terkait pemetaan langkah konkret penyelesaian warga, selain komitmen melaksanakan wajib belajar 12 tahun, Harsono-Halim juga akan melindungi Anak Berkebutuhan

Khusus (ABK), membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan gakin.

Sementara itu Ida-Munir berkomitmen tetap melindungi pedagang kecil, dengan mengarseng pembangunan Mall di Bantul. Dijelaskannya, perkembangan Bantul saat ini sangat pesat, dibuktikan dengan PAD pada tahun 2000 sebesar Rp 6 miliar, kini menjadi Rp 350 miliar. Dijelaskannya, pengentasan kemiskinan menjadi pokok konsentrasi utamanya. Dengan 40 persen warga mengunggulkan mata pencaharian di sektor perdagangan dan usaha menengah kebawah dan 14 persen merupakan pedagang tradisional, maka menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, Ida menutarakan untuk tetap berusaha memperbaiki layanan



Hj Sri Surya Widati (Cabup nomor 2) menyampaikan program dalam debat terbuka.

publik. Bahkan Bantul sudah pernah mendapatkan penghargaan dari 60 kabupaten di Indonesia, Bantul masuk 11 besar kabupaten terbaik soal transparansi akuntabilitas

Sementara Harsono-Halim

berkomitmen melakukan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan tes psikologi pada ASN ketika akan promosi jabatan. (Aje)-a

Kedaulatan Rakyat, 5 Desember 2015

SABTU PON, 5 DESEMBER 2015
(22 SAPAR 1949)

BANTUL

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 4

IDA-MUNIR SAMBANGI PASAR DAN PONPES Pedagang Nangis Bertemu Sri Surya Widati



BANTUL (KR) - Pedagang dan pengunjung di Pasar Ngigih Bantengan dan Pyungan antusias menyambut kedatangan Cabup Hj Sri Surya Widati, Jumat (4/12). Kesempatan bertemu mantan bupati yang dikenal lewat kebijakannya berpihak pada *wong cilik* itu dimanfaatkan pedagang untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan salah satu pedagang Pasar Pyungan menangis haru, ketika bertemu dan bersalaman dengan Hj Sri Surya Widati.

Ny Sunarmi warga Dusun Wogajoyo Desa Srimartani Pyungan Bantul tidak kuasa menahan airu, ketika Hj Sri Surya Widati datang menghampiri tempat

mengajar dagapannya. Perempuan berputra 5 ini sesekali menyeteka air matanya. Begitu Sri Surya Widati menanggalkan tempatnya berdagang, perempuan berjilbab itu mengutarakan alasannya kenapa menangi ketika berjumpa Sri Surya Widati. "Terus terang maa, kami masyarakat kecil diperhatikan, di-buatkan pasar agar hidup kami bisa lebih baik. Ini yang tidak bisa kami lupakan," ujarnya.

Dalam kesempatan tertentu, Sri Surya Widati kerap menengok rakyatnya jalan di pasar. Tidak sebatas ketika mau mencalonkan diri sebagai bupati. Banyaknya fasilitas di pasar, se-

perti di Pyungan menurut Sunarmi tidak lepas dari peran Hj Sri Surya Widati yang sangat peduli dengan masyarakat kecil, termasuk yang datang dari luar Bantul. Semua diberi kesempatan untuk berjualan di Pasar Pyungan. "Kami rakyat Bantul di pasar ini tidak sendiri, ada Bu Idham selalu memperhatikan kami," ujarnya sambil tertesak.

Sementara Ny Weni pedagang lainnya berharap agar Sri Surya Widati kedepan memperhatikan pendirian sin mini market. Baik itu berjaringan atau nama mini market kemasannya baru. "Dulu begitu Bu Idham membangun pasar diseluruh Bantul diikuti kab-

jakan larangan berdirinya mini market baru, kami merasa beruntung punya Bu Idham, tetapi sekarang muncul minimarket baru, kami mohon langsung tadi kepada Bu Idham terkait masalah ini," jelasnya.

Sementara salah satu pendamping Cawabup Misbakhul Munir, Sunardi mengatakan, kegiatan Jumat dipusatkan di beberapa tempat, yakni Pasar Barongan Niten, Pondok Pesantren Yaitu Pyungan Bantul. Dalam kunjungannya ke dua pasar itu, Misbakhul Munir tidak sekadar sosialisasi Pilkada, namun menjangking aspirasi dari pedagang untuk kedepan jadi lebih baik. (Ruy)-a

Hj Sri Surya Widati (tengah) bersama pedagang dan pengunjung Pasar Pyungan Bantul.

KPPS dan Pengawas TPS Bantul Segera Dilantik

BANTUL, TRIBUN - Jelang pemungutan suara pilkada Bantul 9 Desember mendatang, jajaran penyelenggara pemilihan pada tingkat terbawah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pemantau TPS mulai disiapkan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Bantul Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Nuril Hanafi mengungkapkan, pada pilkada ini jumlah pengawas yang dikerahkan lebih banyak dibanding Pemilu 2014 lalu. Panwas mengerahkan tenaga pengawas satu orang per TPS sejumlah 1.768 orang.

"Mulai minggu ini ada pelantikan, tahap perekrutan sudah selesai. Setelah dilantik akan ada bimtek (bimbingan teknis),"

ujarnya, Selasa (17/11).

Menurutnya, seleksi yang dilakukan masing-masing Panwascam dilakukan secara administratif serta wawancara untuk memastikan integritas, kualitas, dan netralitas Pengawas TPS.

Pemberian SK serta pelantikan Pengawas TPS, katanya, akan dilakukan masing-masing Panwascam. Pengawas TPS akan mulai bekerja sejak 23 hari menuju hari H pemilihan, dan berakhir tujuh hari setelah pemilihan.

Menurutnya, karena batas minimal usia Pengawas TPS adalah 18 tahun, personel diisi generasi muda semisal mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya. Meski begitu, pengawas TPS tetap diharuskan dari lingkungan TPS yang diawasi sekaligus terdaftar dalam DPT

TPS bersangkutan.

"Jadi kalau ada yang memilih menggunakan KTP, dia bisa tahu benar mereka warga sana atau bukan," paparnya.

Sementara Komisioner KPU Bantul, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Arif Widayanto menerangkan, anggota KPPS di Bantul sudah mendapatkan SK sejak 8 November. Namun, belum semua dilantik, diantara yang sudah dilantik adalah KPPS desa Sitimulyo, Piyungan.

"KPPS kalau sudah dilantik segera dilakukan koordinasi," katanya.

Dikatakan, KPPS akan diisi tujuh orang dari lingkungan TPS, dimana pelantikan dan SK-nya diberikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tiap desa. (apr)



DIKEROYOK - Puluhan orang melakukan proses penyortiran dan pelipatan suara suara Pilkada Bantul. (foto kiri), Sedang, Komisioner KPU Andang Nugroho menunjukkan surat suara yang rusak. Rabu (18/11). (foto kanan)

Petugas Temukan 16 Surat Suara Rusak

● Surat Suara di Bantul dan Gunungkidul Mulai Disortir

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - KPU Gunungkidul menemukan enam belas surat suara mengalami kerusakan pada hari pertama pelaksanaan penyortiran. Sebagian besar surat suara mengalami kerusakan berupa lubang di bagian lipatan.

Jumlah surat suara yang mengalami kerusakan ini kemungkinan masih akan terus bertambah, karena pada hari pertama baru tiga kecamatan yang disortir. Komisioner KPU Divisi Logistik, Umum dan Rumah Tangga, Andang Nugroho mengatakan, seluruh surat suara yang rusak langsung dipisah.

Nantinya, seluruh surat suara rusak akan ditukar yang baru ke percetakan. "Hingga pukul 16.00 sudah ada 16 surat suara rusak. Itu surat suara untuk dapil Saptosari, Panggang dan Purwosari," katanya di sela-sela pemantauan penyortiran di gudang KPU, Rabu (18/11).

Secara umum, menurut Andang, kualitas surat suara yang dicetak PT Jasuindo, Sidoarjo baik. Cetakannya dinilai bagus, karena prosesnya

dilaksanakan melalui screening ketat.

Sebagian besar surat suara yang ditemukan rusak bukan karena cetakan, melainkan proses pelipatan yang dilakukan petugas perusahaan. "Yang rusak bagian lipatan. Mungkin karena terlalu kuat saat melipatnya," ucapnya.

Proses penyortiran sendiri, lanjutnya, akan dilakukan hingga 24 November mendatang. Setiap hari KPU menargetkan bisa menyelesaikan

saikan penyortiran dan pengepakan surat suara sebanyak tiga kecamatan dengan menerjunkan 42 petugas. Terdiri dari 18 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 24 staf kantor KPU.

"Pada penyortiran ini kita libatkan PPK, setiap hari ada 18 petugas PPK yang bertugas melakukan penyortiran dan pengepakan surat suara," ujarnya.

Sementara Ketua KPU Gunungkidul, M Zainuri

Iksan mengungkapkan, untuk mencegah pemalsuan surat suara, pihaknya bersama PT Jasuindo memasang tiga pengaman. Satu pengaman berupa stiker hologram dan dua pengaman rahasia.

"Dua pengaman tersembunyi ini tak kelihatan, hanya bisa dilihat menggunakan alat khusus," imbuhnya.

Ditanya mengenai distribusi logistik Pilkada, Zainuri menyatakan, pihaknya baru akan me-

laksanakannya pada 7-8 Desember mendatang. Pendistribusian logistik pilkada akan dimulai dari kecamatan yang lokasinya jauh dari kota Wonosari.

Nantinya setiap pendistribusian logistik pilkada akan dilakukan dengan pengawasan kepolisian.

"Setelah proses penyortiran, kita akan segera melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan distribusi," imbuhnya. (has)

Penyortiran Libatkan Kelompok Difabel

BANTUL, TRIBUN - KPU Bantul mulai melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara, setelah semua surat tiba di Bantul dari percetakannya di Surabaya pada Rabu (18/11). Pada penyortiran hari pertama kemarin, puluhan surat suara ditemukan rusak.

Ketua KPU Bantul, M Johan Komara menjelaskan, surat suara telah mereka terima pada Selasa (18/11) malam pukul 23.55. Dengan total surat suara sebanyak 710.666 ditambah 2.000 surat suara cadangan untuk pemilihan ulang.

Kegiatan (penyortiran) ini untuk memastikan surat suara perfect 100 persen, tak ada robek, bercak, atau gradasi warna salah," terangnya.

Pada penyortiran hari pertama saja,

menurutnya, sudah ditemukan puluhan surat suara rusak dimana sebagian besar karena terdapat noda titik tinta pada kotak gambar pasangan calon. Selain itu, terdapat juga surat suara robek, kotor, dan sisi belakang surat suara untuk tandatangan ketua KPPS yang tak tercetak.

"Bercak tinta pada satu kotak kan mirip penandaan pilihan. Maka harus bersih dari noda tinta terutama di kotak gambar paslon," jelasnya.

Menurutnya, setelah semua surat suara yang tak memenuhi syarat tersortir dilakukan rekapitulasi jumlah untuk diminutasi penggantian kepada percetakan berapapun jumlahnya, tanpa ada biaya tambahan dari KPU.

"Selain itu, jumlah surat suara juga

harus pas, tak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan kita musnahkan," terangnya.

Proses sortir dan pelipatan sendiri, lanjutnya, akan dilakukan selama empat hari kedepan melibatkan 100 orang dari 20 kelompok. Dimana tiga kelompok merupakan perwakilan masyarakat difabel yang ada di Bantul.

Personel yang melakukan penyortiran dan pelipatan, katanya, akan mendapat honor Rp 75 per lembar yang disortir. Semua personel telah melalui tahap seleksi sesuai yang disyaratkan, semisal usia maksimal 50 tahun dan teraja independensinya.

"Tak boleh ada kepentingan apapun dan tak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik atau paslon," katanya. (apr)

Pilkada Serentak 2015 09 DES 9

Debat Cabup Bantul Panas

Harsono Singgung Kasus Dugaan Korupsi Hibah Persiba

YOGYA, TRIBUN - Debat publik putaran pertama Pilkada Bantul 2015, Kamis (19/11), berlangsung panas. Debat yang digelar di Studio Jogja TV, Brebah Sleman tersebut mempertemukan kedua Calon Bupati Bantul, Suharsono (nomor urut 1) dan Sri Surya Widati (nomor urut 2).

Debat kemarin mengambil tema layanan dasar, peningkatan ekonomi kecil-menengah dan tata ruang dengan dimoderatori akademisi UGM, Mada Sukmajati. Suasana panas debat sudah terasa saat penyampaian visi-misi, dimana cabup nomor urut satu, Suharsono dalam pemaparannya langsung menekankan pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kebijakan saya dalam pemberantasan KKN adalah karena kita masuk di birokrasi pemerintahan. Kebijakan harus sesuai normanya, jangan sampai melanggar aturan yang ada," jelas Harsono.

Sedangkan Cabup Petahana, Sri Surya Widati menggunakan semboyan Bantul sebagai visinya yaitu mewujudkan Bantul Projo-tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

"Kita ingin mewujudkan Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, asri. Itu adalah Projo-tamansari," ungkap Ida.

Debat makin memanas saat tiap sesi, cabup Suharsono melontarkan kritik kepada jalannya pemerin-

?? Bantul punya Bank Bantul, kenapa tak melayani rakyat kecil dan malah melayani pejabat ??

SUHARSONO

Cabup Bantul Nomor Urut 1

tahan masa cabup petahana Sri Surya Widati. Tiap kritik yang dilontarkan Harsono juga mendapat cemoohan dari pendukung Ida-Munir di luar studio sehingga membuat situasi makin panas.

Dalam bidang layanan dasar, Suharsono mengungkapkan banyak mendapat laporan banyaknya pungutan liar pendidikan di Bantul, serta belum meratanya layanan kesehatan.

Karenanya, dalam satu misinya ia menekankan wajib belajar 12 tahun, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan menyediakan perawatan kesehatan memadai untuk seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemberian keringanan sampai pembebasan biaya bagi masyarakat prasejahtera. Harsono juga mengkhawatirkan, laju konversi lahan pertanian menjadi pemukiman semakin pesat. Ia berjanji akan mencegahnya, agar produksi tani Bantul tetap terjaga.

Mengenai pengembangan ekonomi kecil-menengah Harsono menyayangkan, kebijakan pemda yang dianggapnya belum berpihak kepada pedagang kecil dengan banyaknya lintah darat dan makin berkembangnya

toko berjejer di dekat pasar tradisional.

"Bantul punya Bank Bantul, kenapa tak melayani rakyat kecil dan malah melayani pejabat," terangnya.

Puncak panasnya debat terjadi saat sesi tanya jawab, Harsono mempertanyakan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba, yang melibatkan nama Idham Samawi, yang saat itu juga hadir menyaksikan debat.

Ida secara tenang mampu menjawab kritikan Harsono, Ida lebih banyak menjelaskan keberhasilan program yang berlangsung pada masa pemerintahannya.

Menurutnya bidang kesehatan, Bantul sudah memiliki 27 puskesmas dengan 17 diantaranya memiliki layanan rawat inap. "Bantul sudah punya program unggulan Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK), yaitu bebas dari kematian ibu, kematian bayi, penderita DBD dan gizi buruk," jelas Ida.

Ida mengklaim sudah menjalankan berbagai kebijakan mengenai pesatnya konversi lahan pertanian dengan moratorium izin prinsip pembangunan perumahan di lima kecamatan. (apr)

Tribun Jogja, 24 November 2015

Ribuan Surat Suara Ditemukan Rusak

BANTUL, TRIBUN - Ribuan surat suara pilkada di Bantul dan Sleman ditemukan rusak setelah disortir. Di Bantul, dari 712.666 surat suara yang telah diterima KPU Bantul terdapat 846 surat suara mengalami kerusakan.

Ketua KPU Bantul, M Johan Kumara menjelaskan, sebanyak 846 surat suara tak memenuhi syarat sehingga harus dieliminasi. Menurutnya, terdapat tiga jenis kerusakan yang teridentifikasi, yaitu surat suara sobek, ada bercak pada kotak gambar paslon, serta pencetakan yang hanya pada satu muka, dimana seharusnya tercetak dua muka.

"Paling banyak yang hanya dicetak satu muka," terangnya, Senin (23/11).

Johan menambahkan,

penggantian surat suara tersebut tak akan menghambat jadwal Pilkada. Pasalnya, pencetakan surat suara pengganti tak memerlukan waktu lama.

Surat suara rusak direncanakan akan dimusnahkan pada 4 Desember nanti. "Tak boleh ada satu surat suara pun di KPU saat pemilihan nanti," terangnya.

Sementara di Sleman, KPU Sleman menemukan 9.722 lembar surat suara mengalami kerusakan. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari total surat suara yang diterima KPU.

Komisioner Divisi Logistik dan Keuangan KPU Sleman, Aswino Wardana mengatakan, dari total 800.191 lembar surat suara yang dicetak, terdapat 7.294 lembar yang salah pemotongan. Sedangkan 1.610

lembar surat suara yang dianggap rusak lantaran foto pasangan calon terke- nana tinta, dan 818 lembar terdapat titik-titik pada foto paslon.

"Atas kerusakan ini, kami meminta pihak ketiga segera melakukan penggantian," ungkapnya, Senin (23/11).

Menurutnya, dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, disepakati jika ditemukan surat suara yang mengalami kerusakan akan segera diganti. Rencananya surat suara pengganti akan diterima Rabu (25/11) besok.

"Pihak ketiga merupakan perusahaan dari Kudus yang memiliki kualifikasi khusus *micro text* dan *hidden image* untuk pengamanan surat suara. Saat ini, sedang proses penggantian," paparnya.

Akibat kerusakan ribuan surat suara ini, Aswino menyebut terdapat satu desa di Kecamatan Tempel yang belum mendapat jatah surat suara. Kendati demikian, ia tak menyebutkan detail desa itu.

"Ada 12 TPS yang belum dapat, atau sekitar 4.500 lembar surat suara," katanya.

Ketua Panwaslu Sleman, Djajadi meminta, KPU segera memastikan surat suara siap didistribusikan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Dengan demikian, kebutuhan di semua TPS dapat terpenuhi dan siap melaksanakan pemungutan suara.

"Harus dipastikan dan jangan sampai ada yang kurang kesiapannya," ujarnya. (ap/ang)

KPU Umumkan Kekayaan Harta Para Paslon Pilkada Bantul

BANTUL, TRIBUN - KPU Bantul telah mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul pada Pilkada 2015. LHKPN merupakan syarat wajib majunya paslon dalam pilkada sesuai undang-undang.

Ketua KPU Bantul, M Johan Komara menjelaskan, sesuai pasal 73 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 paslon diwajibkan menyerahkan LHKPN kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dilakukan penelitian dan verifikasi. Setelah verifikasi, KPU akan mengumumkannya ke publik.

"Ada kewajiban paslon untuk mengumumkan LHKPN kepada publik melalui KPU," jelasnya, Senin

(23/11).

Menurutnya, KPU sebenarnya disyaratkan untuk mengumumkan LHKPN paslon paling lambat dua hari sebelum pemilihan. Namun, KPU Bantul memilih mengumumkannya lebih awal agar publik bisa lebih leluasa mencermati kekayaan apa saja yang dimiliki calon pemimpinnya, apakah wajar atau tidak.

"Masyarakat bisa mencermati kaitannya dengan meminimalisasi potensi korupsi," katanya.

Data LHKPN, menurutnya, bisa diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website KPU Bantul, kpu-dantul.kab.go.id. Dalam data yang diunggah KPU Bantul diketahui, bahwa cabup nomor urut satu, Suharsono memiliki kekayaan terbanyak,

yakni Rp15.055.349.808.

Harta itu paling banyak bersumber dari giro dan kas lainnya, serta 12 lokasi lahan yang dimiliki Suharsono di Bantul. Menyusul kemudian cabup nomor urut satu, Sri Surya Widati-Misbakhul Munir sebesar Rp1.608.783.2410.

Kemudian cawabup nomor urut satu, Abdul Halim Muslih sebesar Rp810.740.000 meningkat drastis dibanding kekayaannya saat laporan tahun 2003 sebesar Rp43.570.000. Sementara cawabup nomor urut dua, Misbakhul Munir, memiliki kekayaan paling sedikit dibanding kandidat lainnya sebesar Rp569.297.658.

Namun, Munir juga merupakan satu-satunya kandidat yang masih memiliki utang sebesar Rp11.373.800. (ap/ang)

Bagi-bagi Hadiah Disorot JPPR

Pasangan Calon Menggelar Acara Olahraga

BANTUL, TRIBUN - Pembagian hadiah dalam masa kampanye oleh kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam pilkada Bantul, mendapat sorotan dari lembaga pemantau independen.

Salah satu lembaga yang ikut memantau jalannya pilkada Bantul, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengungkapkan temuannya bahwa banyak kegiatan menjurus kampanye yang dilakukan oleh kedua paslon, dengan kedok jalan sehat, sepeda sehat dan even lainnya yang diakhiri dengan pembagian hadiah.

"Pemberian door prize dalam kegiatan kampanye terselubung jelas dilarang. Selain karena biaya melebihi ketentuan, juga karena terdapat unsur politik uang dalam pembagian hadiah tersebut," ungkap peneliti JPPR Bantul, Umar Said, Selasa (1/12).

Dalam pasal 26 ayat 3

“Pemberian barang kepada pemilih dalam kondisi kampanye terselubung atas nama jalan sehat tetaplah pelanggaran”

UMAR SAID

Peneliti JPPR Bantul

Peraturan KPU No 7 tahun 2015 tentang kampanye, paslon diperbolehkan membuat dan membagikan bahan kampanye seperti mug, kaos, dan lainnya dengan batasan harga maksimal Rp24 ribu per unit.

Dalam pantauan JPPR, kedua paslon sama-sama melakukan pembagian hadiah dalam kegiatan yang diduga kampanye terselubung. Misalnya paslon nomor urut satu, Suharsono-Abdul Halim

Muslih, dalam senam massal serentak pada Minggu (16/11) di lima kecamatan yaitu Jotts, Dlingo, Banguntapan, Pajangan dan Piyungan.

"Hadiah dalam kegiatan tersebut di antaranya sepeda motor, sepeda gunung, kulkas, televisi, setrika dan DVD," papar Umar.

Bahkan pada acara jalan sehat sore perubahan yang direncanakan digelar oleh pasangan ini pada tanggal 5 Desember 2015, door prize terbesar berupa umroh.

Sejumlah event berhadiah juga digelar oleh paslon nomor urut dua, Sri Surya Widati-Misbakhul Munir. Dalam jalan sehat di Lapangan Tirirenggo pada Minggu (8/11), sepeda motor, kulkas, kipas angin dan peralatan rumah tangga lainnya menjadi door prize.

Selain itu, masih ada pula event Liga Futsal Sri Surya Widati Cup pada 31 Oktober-7 November berhadiah ternak seperti kambing dan bebek. Event olahraga lainnya yang digelar paslon nomor dua adalah Turnamen Voli Sri Surya Widati Cup pada 22 November hingga 3 Desember berhadiah total Rp7,5 juta.

"Pemberian barang kepada pemilih dalam kondisi kampanye terselubung atas nama jalan sehat tetaplah pelanggaran," jelas Umar.

Potensi politik uang, lanjutnya, bisa terlihat dengan mengumpulkan masyarakat dan memberikan harapan mendapat undian. Kegiatan tersebut dinilai bisa mempengaruhi pilihan pemilih dengan mengatasnamakan kegiatan lain.

Karena itu, Umar berharap panwas bisa melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran tersebut tanpa menunggu laporan masyarakat. (apr)

Tak Ajak Memilih

KETUA Tim Relawan Rumah Pergerakan Sri Surya Widati, Noor Janis, mengelak jika sebagai event yang disebut JPPR merupakan bentuk kampanye terselubung. Acara tersebut murni kegiatan kemasyarakatan dan olahraga. Sehingga tidak terdapat unsur kampanye.

"Misal futsal, namanya Sri Surya Widati Cup tapi tidak ada ajakan, imbauan ataupun penyampaian visi-misi," paparnya.

Berbagai hadiah dan door prize yang dibagikan pun, lanjutnya, sudah sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga tidak ada ajakan memilih bagi penerimanya.

Senada dengan Janis, Sekretaris Tim Sukses Harsono-Halim, Afif Iskandar mengungkapkan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan yang mereka

gelar. Pasalnya, barang yang dibagikan sudah sesuai ketentuan. "Kami berkegiatan sudah sesuai aturan," paparnya.

Temuan panwas Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Bantul Divisi Hukum, Pelaporan dan Penindakan, Harlina mengungkapkan, beberapa event yang disebutkan JPPR telah masuk dalam temuan panwas. Namun pihaknya masih akan mengkaji terpenuhinya unsur materi pelanggaran aturannya. "Bisa jadi potensi pelanggaran," katanya.

Larangan politik uang, tambah Harlina, tercantum dalam pasal 73 UU nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Selain itu pelaku juga bisa terjerat pasal 149 KUPH. "Jadi selain pelanggaran pilkada bisa juga masuk pidana umum," pungkasnya. (apr)

Hadiri Kampanye Paslon Lain

PPP Siapkan Sanksi Pengurus Mbalelo

BANTUL, TRIBUN - Kehadiran atribut dan ribuan simpatisan PPP dalam kampanye pasangan calon (pason) Pilkada Bantul nomor urut 1 Suharsono-Halim di Lapangan Ringinharjo, Minggu (29/11), mendapat sorotan dari DPC PPP Bantul, yang secara resmi justru mendukung paslon nomor urut 2 Sri Surya Widadati-Misbakhul Munir.

Sekretaris DPC PPP Bantul, Eko Sutrisno Aji, mengaku tengah menginventarisasi adanya pengurus struktural PPP yang menghadiri kampanye terbuka tersebut. "Memang ada dan sudah masuk dalam pencermatan, tapi belum bisa kita sampaikan," katanya, Selasa (1/12).

Sanksi, menurut Eko, bisa diberikan jika oknum yang hadir merupakan pengurus struktural PPP. Meski begitu, simpatisan yang membawa

”Memang ada dan sudah masuk dalam pencermatan, tapi belum bisa kita sampaikan”

EKO SUTRISNO AJI

Sekretaris DPC PPP Bantul

atribut PPP belum tentu merupakan anggota resmi dari PPP maupun badan otonom (banom) di dalamnya. "Belum tentu mereka yang membawa bendera GPK itu GPK," paparnya.

Eko menguraikan, DPC sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan agar warga PPP tidak menghadiri kampanye terbuka Harsono-Halim. Pasalnya PPP secara resmi hanya mendukung Ida-Munir.

Hadirnya ribuan massa beratribut PPP dalam kampa-

nye paslon lain dikhawatirkan berpengaruh dalam upaya kemenangan pilkada. Tapi Eko memastikan PPP Bantul hingga saat ini tetap solid melabuhkan dukungannya kepada calon petahana. "Itu nanti jadi bagian evaluasi ke depannya yang harus kita tata," bebernya.

Wakil Ketua DPC PPP Bantul, Suwandi mengungkapkan, penindakan bisa dilakukan terbatas pada kader yang tercatat dalam struktur kepengurusan partai maupun banom. Sedangkan untuk simpatisan, pihaknya kesulitan karena belum memiliki data kader.

Namun sanksi tetap bisa diterapkan, karena dalam partai memiliki hak dan kewajiban yang mengikat anggota. "Sanksi bisa berupa SP (surat peringatan) sampai pengembalian kartu tanda anggota," jelas Suwandi. (apr)